



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIADI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
3. NHK : 169020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.345.184.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/80 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 409.732.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/60 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 370.452.000
3. Tanah Seluas 518 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
6. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 653 m²/117 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/15 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 27.100.000

1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 100.000



2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 27.601.489

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.399.885.489

III. HUTANG

Rp. 726.141.659

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.673.743.830

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.